

LKjIP



BAPENDA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BATAM



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BADAN PENDAPATAN DAERAH

2022



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kota Batam dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2022 disusun sebagai pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah di perjanjikan antara Kepala Badan dan Walikota Batam Tahun 2022. Sebagai proses yang berkesinambungan dengan tahun yang sebelumnya maka isi yang terkandung di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan kesepakatan bersama untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara bersama-sama oleh seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah Kota Batam.

Kami sadar bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa kami nantikan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di tahun mendatang.

Batam, Februari 2023

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BATAM**



RAJA AZMANSYAH

NIP. 19701120 200003 1 009

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Grafik /Gambar.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum.....	3
1.3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	4
1.4. Susunan Organisasi.....	6
1.5. Sumber Daya Organisasi.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	11
2.1. Rencana Strategis.....	11
2.2. Program dan Kegiatan.....	15
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	18
3.2. Realisasi Anggaran.....	28
BAB IV PENUTUP	31
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2022.....	10
Tabel 2.1 Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	13
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah Kota Batam.....	17
Tabel 3.1 Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2022.....	18
Tabel 3.2 Data Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2022.....	19
Tabel 3.3 Data Perbandingan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2022.....	24
Tabel 3.4 Data Perbandingan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2021 dan Tahun 2022.....	25
Tabel 3.5 Target Dan Realisasi APBD Pemerintah Kota Batam Tahun 2018 s.d 2022.....	26
Tabel 3.6 Anggaran dan Realisasi Belanja masing-masing Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2022.....	28

DAFTAR GRAFIK/GAMBAR

		Hal
Gambar 1.1	Bagan Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Batam.....	8
Grafik 3.1	Target Dan Realisasi APBD, PAD, dan Pajak Daerah Kota Batam Tahun 2018-2022.....	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu sebagai pedoman penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kepala Badan Pendapatan Daerah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Badan Pendapatan Daerah sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Batam, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, tetapi juga

memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka di terbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Badan Pendapatan Daerah Kota Batam diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 DASAR HUKUM

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Laporan Capaian Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23

Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 77 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah, Inspektorat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan;
17. Peraturan Walikota Batam Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah.

1.3. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Yang kemudian diatur dalam Peraturan Wali Kota Batam

Nomor 77 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah, Inspektorat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan dan Peraturan Walikota Batam Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah.

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Pengelolaan Pendapatan Pajak dan Retribusi daerah serta tugas lain yang diberikan Walikota.

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas pokok, Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Wali Kota;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pendapatan daerah;
- d. Pengelolaan administrasi umum, meliputi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian serta urusan keuangan dan barang daerah.

1.4. SUSUNAN ORGANISASI

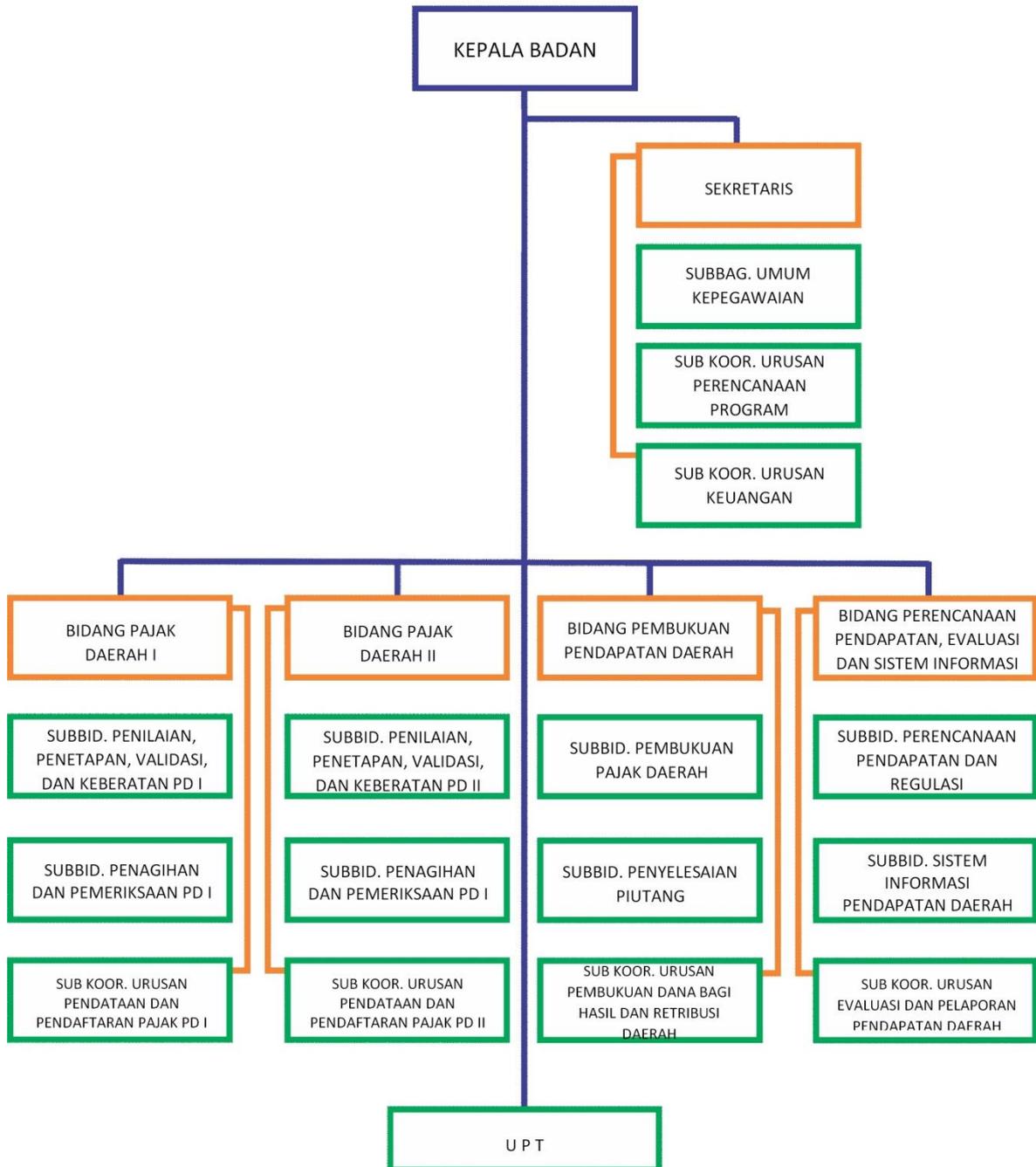
Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Batam terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Koordinator Urusan Perencanaan Program
 3. Sub Koordinator Urusan Keuangan
- c. Bidang Pajak Daerah I, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi dan Keberatan Pajak Daerah I;
 2. Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah I;
 3. Sub Koordinator Urusan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah I.
- d. Bidang Pajak Daerah II, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi dan Keberatan Pajak Daerah II;
 2. Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah II;
 3. Sub Koordinator Urusan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah II.
- e. Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pembukuan Pajak Daerah;
 2. Sub Bidang Penyelesaian Piutang;
 3. Sub Koordinator Urusan Pembukuan Dana Bagi Hasil dan Retribusi Daerah.
- f. Bidang Perencanaan Pendapatan, Evaluasi, dan Sistem Informasi, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dan Regulasi;
 2. Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah;

3. Sub Koordinator Urusan Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Gambar 1.1

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH



Sumber :

Peraturan Wali Kota Batam Nomor 77 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah, Inspektorat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan

1.5. SUMBER DAYA ORGANISASI

I. Personil

Sumber Daya Aparatur merupakan unsur yang sangat penting dalam sebuah organisasi dan berperan sebagai penggerak roda organisasi yang dapat menentukan berhasil tidaknya sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sumber Daya Aparatur merupakan aset organisasi yang harus terus dibina dan dipelihara agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Khususnya Aparatur Badan Pendapatan Daerah Kota Batam yang mana mempunyai peranan penting dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan sumber data Sekretariat pada Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2022 saat ini didukung sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1.	Menurut latar belakang pendidikan :	
	a. Pasca Sarjana (S2)	12 orang
	b. Sarjana (S1)	41 orang
	c. Sarjana Muda	7 orang
	d. SLTA	33 orang
	e. SMP	0 orang
	f. SD	1 orang
2.	Menurut golongan :	
	a. Golongan IV	2 orang
	b. Golongan III	68 orang
	c. Golongan II	25 orang
	d. Golongan I	2 orang
3.	Menurut jabatan :	
	a. Eselon II	1 orang
	b. Eselon III	5 orang
	c. Eselon IV	9 orang
4.	Pendidikan dan Pelatihan Struktural :	
	a. Diklatpim Tk. II	1 orang
	b. Diklatpim Tk. III	0 orang
	c. Diklatpim Tk. IV	10 orang

Selain itu juga terdapat Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 108 (seratus delapan) orang.

II. Penganggaran

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Batam mendapatkan alokasi belanja sebesar Rp 36.405.723.346 yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan realisasi sebesar Rp 34.498.858.495 atau 94,76% dapat dilihat seperti yang tercantum pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah
Kota Batam Tahun 2022

JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	%
Belanja Operasi	35.409.597.346	33.553.092.495	94,76
Belanja Modal	996.126.000	945.766.000	94,94
JUMLAH	36.405.723.346	34.498.858.495	94,76

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Batam mencakup Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. Kebutuhan akan visi dan misi merupakan sesuatu yang sangat mutlak sebagai pedoman organisasi/instansi untuk melangkah jauh ke depan dan terus berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif dan produktif serta selalu siap menyikapi perkembangan.

Sebagai cara pandang kedepan maka visi dan misi harus dirumuskan sedemikian rupa untuk mencapai hasil yang akan diraih oleh organisasi/instansi dan dapat memberikan motivasi bagi staf untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara sungguh-sungguh dalam meningkatkan pendapatan daerah.

I. Visi

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah disusun dengan berpedoman pada penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah. Visi Kepala Daerah adalah “Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera”.

II. Misi

Dalam mencapai visi yang telah ditetapkan, adapun tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah yang berkaitan dengan Misi Kepala Daerah yakni Misi ke 5 (lima) yang berbunyi “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif, dan Efisien Berbasis Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat”

III. Tujuan

Adapun Tujuan yang menjadi fokus dari Badan Pendapatan Daerah yaitu “Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah Kota Batam melalui Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah”.

IV. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis pemerintah daerah.

Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi/pemerintah daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun ke depan.

Berdasarkan pengertian tersebut maka Badan Pendapatan Daerah Kota Batam menetapkan sasaran yaitu “Meningkatnya Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah”

V. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah atau upaya-upaya yang diperlukan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah dijelaskan sebelumnya, maka disusunlah strategi dari Badan Pendapatan Daerah yakni “Meningkatkan Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah”.

Sedangkan arah tujuan yang disusun sebagai berikut:

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung operasional optimalisasi pajak daerah;
2. Melakukan pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah;
3. Melakukan kajian dan peninjauan ulang regulasi daerah untuk optimalisasi pajak dan retribusi daerah;
4. Melanjutkan proses verifikasi dan updating data wajib pajak PBB;
5. Melakukan sosialisasi dan penegakan hukum untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB.

Tabel 2.1

Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi Kota Batam : Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera			
Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien Berbasis Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan kemandirian keuangan daerah Kota Batam melalui peningkatan pajak dan retribusi daerah	Meningkatnya realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah	Meningkatkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung operasional optimalisasi pajak daerah; 2. Melakukan pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah; 3. Melakukan kajian dan peninjauan ulang regulasi daerah untuk optimalisasi pajak dan retribusi daerah; 4. Melanjutkan proses verifikasi dan updating data WP PBB; 5. Melakukan sosialisasi dan penegakan hukum untuk meningkatkan kepatuhan WP; 6. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait dengan mengusulkan penyediaan SDM fungsional untuk juru sita, penilai pajak, dan pemeriksa pajak.

2.2 PROGRAM DAN KEGIATAN

Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2022 mempunyai program dan kegiatan meliputi:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
 - 1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - 1.3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - a. Pengadaan Mebel.
 - 1.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 - 1.5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya.

II. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

2.1. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah

- a. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
- b. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
- c. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;
- d. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
- e. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- f. Penagihan Pajak Daerah;
- g. Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah.

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Badan Pendapatan Daerah Kota Batam pada Tahun 2022 telah menyusun dokumen Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja yang memuat program ataupun kegiatan sesuai dengan sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021.

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis tersebut, maka dilaksanakan 2 (dua) program dengan pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Badan Pendapatan Daerah Kota Batam

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Optimalisasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Target dan Pengkoordinasian Retribusi Daerah	100%
	Persentase Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Target	100%

Program		Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.660.368.426	P-APBD 2022
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.745.354.920	P-APBD 2022
Total		36.405.723.346	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Analisis pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2022 sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja menunjukkan bahwa secara umum Badan Pendapatan Daerah Kota Batam telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Dari hasil analisis pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2022 terdapat 1 sasaran dan 2 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran atas 1 sasaran dan 2 indikator tersebut, maka pencapaian indikator kinerja masing-masing sasaran dapat dilihat dalam Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	Optimalisasi dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Target dan Pengkoordinasian Retribusi Daerah	100%	81,72 %
		Persentase Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Target	100%	82,26 %

Berdasarkan tabel 3.1 dapat dikemukakan analisis pencapaian sasaran dan indikator kinerjanya sebagai berikut:

Indikator yang dilaksanakan pada sasaran ini sebanyak 2 indikator yaitu:

1. Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Target dan Pengkoordinasian Retribusi Daerah pada Tahun 2022 sebesar 100%, dengan realisasi capaian sebesar 81,72%
2. Target Persentase Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Target pada Tahun 2022 sebesar 100% dengan realisasi capaian sebesar 82,26 %.

Adapun Capaian Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Capaian realisasi kinerja dari sektor Pajak Daerah Tahun 2022 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 terjadi penurunan hanya di Pajak Reklame. Namun dari segi total pendapatan mengalami kenaikan realisasi sebesar 29,79% Secara rinci perbandingan realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Data Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2022

No	Jenis Pajak Daerah	Realisasi s/d TW IV Tahun 2021 Rp	Realisasi s/d TW IV Tahun 2022 Rp	Bertambah/ Berkurang Rp	%
1	Hotel	39.121.715.865,07	84.740.006.009,87	45.618.290.140,80	116,61
2	Restoran	63.885.350.322,69	95.073.526.838,43	31.188.176.515,74	48,82
3	Hiburan	10.730.059.900,89	24.259.965.806,34	13.516.751.905,45	126,09

No	Jenis Pajak Daerah	Realisasi s/d TW IV Tahun 2021 Rp	Realisasi s/d TW IV Tahun 2022 Rp	Bertambah/ Berkurang Rp	%
4	Reklame	9.151.833.000,00	8.119.832.000,00	(1.014.611.000,00)	-11,28
5	Penerangan Jalan	217.388.227.416,81	250.768.369.457,95	33.380.142.041,14	15,36
6	Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.427.230.581,71	3.129.240.695,01	1.702.010.113,30	119,25
7	Parkir	5.486.224.985,00	8.997.995.028,00	3.576.664.916,00	64,01
8	BPHTB	261.667.938.607,00	346.139.511.039,00	84.471.572.432,00	32,28
9	PBB P2	187.778.130.099,00	212.752.504.071,00	24.974.373.972,00	13,29
TOTAL		796.651.133.373,17	1.033.980.950.945,63	237.413.371.040,43	29,79

Menyikapi hal ini, maka di Tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah Kota Batam melakukan beberapa kebijakan sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah di masa pasca Pandemi Covid 19 antara lain:

- a) Kebijakan Insentif Pajak Daerah yaitu:
- Perpanjangan jatuh tempo, pengurangan piutang pokok penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan Kota Batam tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 75 Tahun 2022.
 - Pemberian pembebasan sanksi administratif berupa penghapusan denda dan/atau bunga pajak daerah.

b) Aplikasi Publik Layanan Perpajakan

- **SIEPENDA** : <https://siependa.batam.go.id>

Sistem Aplikasi yang berfungsi untuk memberikan informasi reaiasai Penerimaan Daerah secara *real-time*

- **E-BPHTB** : <https://ebphtb.batam.go.id>

Aplikasi yang berfungsi untuk pencatatan realisasi penerimaan BPHTB, serta untuk verifikasi kelengkapan data dan kewajaran pembayaran BPHTB

- **E-SPTPD** : <https://esptpd.batam.go.id>

Sistem yang terintegrasi dengan SIMAPATDA, digunakan oleh publik untuk melaporkan Pajak Daerah yang telah dilakukan

- **E-SPPT PBB-P2** : <https://esppt.batam.go.id>

Aplikasi yang dibangun untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak PBB-P2 untuk melihat kewajiban Pajak PBB-P2 terhutang serta mencetak SPPT PBB-P2 sendiri

- **E-BILLING** : <https://ebilling.batam.go.id>

Sistem yang terintegrasi dengan SIMAPATDA dan BANK RIAU KEPRI, digunakan oleh publik untuk membuat Kode Billing pembayaran Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB

- **E-PENDAFTARAN** :

<https://edaftarpajak.batam.go.id>

Mempermudah proses pendaftaran Wajib Pajak dan Objek Pajak yang secara otomatis dapat memverifikasi laporan perndaftaran.

- c) Optimalisasi Pajak Daerah, yaitu:
- Dengan Peningkatan Layanan Perpajakan Secara Online melalui aplikasi Whatsapp serta melakukan Validasi Online melalui e-signature, berkas validasi dapat dicek langsung oleh PPAT.
 - Melakukan Roadshow (Jemput Bola) Pelayanan PBB di 12 (*dua belas*) Kecamatan, Komplek Perumahan dan Pusat Pembelian.
 - Melakukan Penagihan Secara Aktif terhadap Piutang Pajak Daerah dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan.
- d) Meningkatkan Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah, antara lain:
- Kerjasama dengan Disdukcapil Kota Batam, dalam hal pemanfaatan NIK untuk pelayanan Pajak Daerah.
 - Kerjasama dengan DJPK Kanwil Provinsi Kepulauan, dalam hal Optimalisasi peningkatan Pajak Pusat dan Pajak Daerah.
 - Kerjasama dengan BPN, dalam hal integrasi data pertanahan dengan PBB-P2 dan BPHTB.
 - PT. Bright PLN Batam, dalam hal pemungutan dan penyetoran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan pembayaran rekening listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kota Batam
 - Kerjasama dengan Diskominfo dan DPMPSTP Kota Batam, dalam hal pelaksanaan Peraturan Walikota Batam Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

- Kerjasama dengan OPD Penghasil Kota Batam, dalam hal peningkatan Retribusi Daerah melalui program Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP) Kota Batam.
- Kerjasama dengan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), dalam hal informasi lahan yang belum dikelola, Pelunasan PBB bagi wajib pajak yang mau mengurus lahan di BP Batam.
- Kerjasama dengan KPKNL Batam, dalam hal wajib pajak yang memenangi lelang/tender wajib untuk melunasi BPHTB nya;
- Kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Batam, dalam hal penagihan piutang pajak daerah.
- Kerjasama pembayaran Pajak Daerah dengan Mitra Bank lainnya yaitu : Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BSI, Bank BJB Sumut, dan PT. Pos Indonesia.

2) Capaian realisasi kinerja dari sektor Retribusi Daerah terjadi Penurunan terhadap realisasi yaitu sebesar -1,05 adanya penurunan tersebut terdapat pada retribusi perizinan tertentu. Secara rinci perbandingan realisasi penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Data Perbandingan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah
Tahun 2021 dan Tahun 2022

No.	Jenis Retribusi Daerah	Realisasi s/d TW IV Tahun 2021 Rp	Realisasi s/d TW IV Tahun 2022 Rp	Bertambah/ Berkurang Rp	%
1	Jasa Umum	50.641.823.694,33	61.194.106.749,00	10.552.283.054,67	20,84
2	Jasa Usaha	782.048.691,00	920.756.583,00	138.707.892,00	17,74
3	Perizinan tertentu	44.383.186.591,00	32.682.472.840,32	(11.700.713.750,68)	(26,36)
	Jumlah	95.807.067.976,33	94.797.336.172,32	(1.009.722.804,01)	(1,05)

Berdasarkan data penerimaan yang berasal dari Retribusi Daerah jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya mengalami penurunan, terutama penurunan yang cukup besar terdapat pada Retribusi perizinan tertentu. Namun pada Retribusi jasa umum dan jasa usaha mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Beberapa hal yang ditempuh sebagai upaya meningkatkan penerimaan Retribusi Daerah antara lain:

- a) Melakukan penyesuaian peraturan dan tarif retribusi daerah yang sudah lama dan tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.
- b) Melakukan perbaikan dan kemudahan pelayanan kepada wajib pajak/masyarakat. Hal ini dilakukan agar tumbuh kesadaran dan keinginan wajib pajak/masyarakat dan dunia usaha dalam melakukan pembayaran retribusi daerah.
- c) Membangun kesadaran seluruh pemangku kepentingan dalam hal ini Perangkat Daerah Penghasil tentang tugas dan tanggung jawabnya selaku pengelola retribusi daerah

sesuai bidang tugasnya untuk melakukan upaya-upaya peningkatan penerimaan retribusi daerah.

- 3) Capaian realisasi kinerja untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara keseluruhan terjadi kenaikan terhadap realisasi sebesar 17,21%. Secara rinci perbandingan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2021 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Data Perbandingan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun 2021 dan Tahun 2022

No.	Jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Realisasi s/d TW IV Tahun 2021 (Rp)	Realisasi s/d TW IV Tahun 2022 (Rp)	Bertambah/Berkurang	
				(Rp)	%
1	Hasil Pajak Daerah	796.651.133.373,17	1.033.980.950.945,63	237.329.817.572,46	29,79
2	Hasil Retribusi Daerah	95.807.067.976,33	94.797.336.172,32	(1.009.731.804,01)	(1,05)
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan	12.648.420.047,00	10.376.332.794,00	(2.272.087.253,00)	(17,96)
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	188.912.711.238,46	143.178.032.229,30	(45.734.679.009,19)	(24,21)
Jumlah		1.094.019.332.634,96	1.282.332.652.141,25	188.313.319.506,29	17,21

Tabel 3.5
Target Dan Realisasi APBD Pemerintah Kota Batam
Tahun 2018 s.d 2022

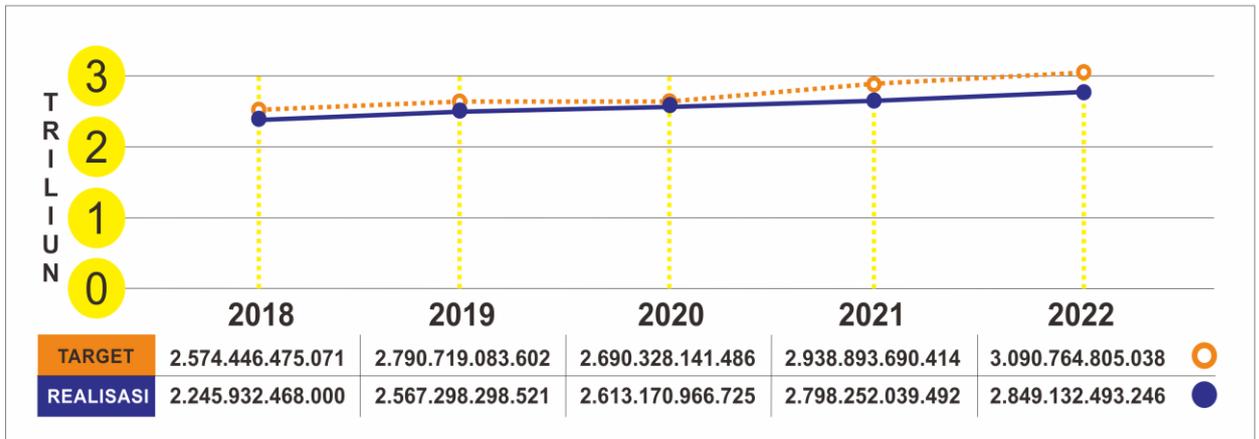
NO	TAHUN	TARGET APBD (RP)	REALISASI	
			(RP)	%
1	2018	2.574.446.475.071,26	2.425.932.467.999,76	94,23
2	2019	2.790.719.083.602,16	2.567.298.521.351,04	91,99
3	2020	2.690.328.141.486,44	2.613.160.466.725,49	97,13
4	2021	2.938.893.690.414,00	2.795.333.650.064,74	95,12
5	2022	3.090.764.805.038,00	2.849.132.493.246,25	92,18

Sumber:

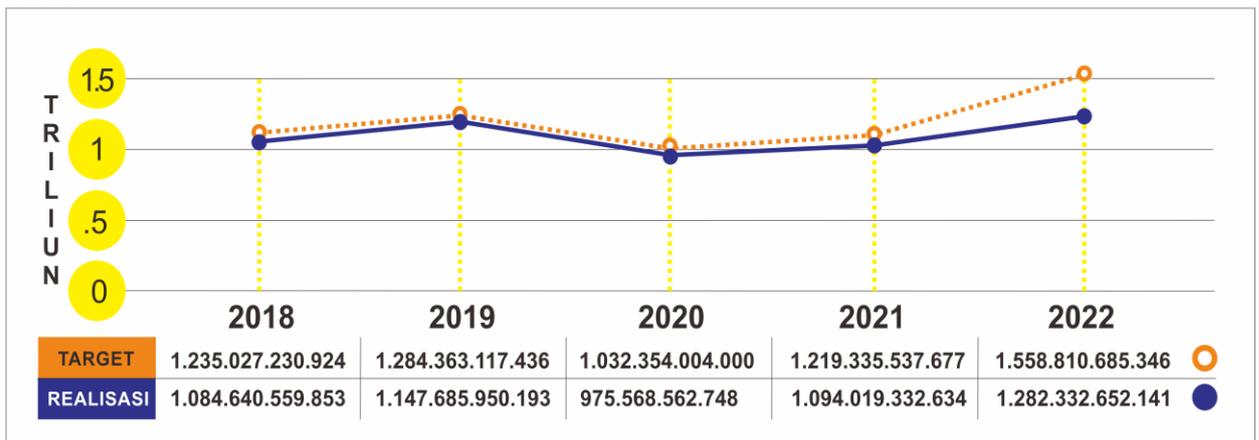
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam
 - Badan Pendapatan Daerah Kota Batam
- (Angka realisasi Pendapatan Tahun 2022)*

Grafik 3.1
Target Dan Realisasi APBD, PAD dan Pajak Daerah Kota Batam
Tahun 2018 – 2022

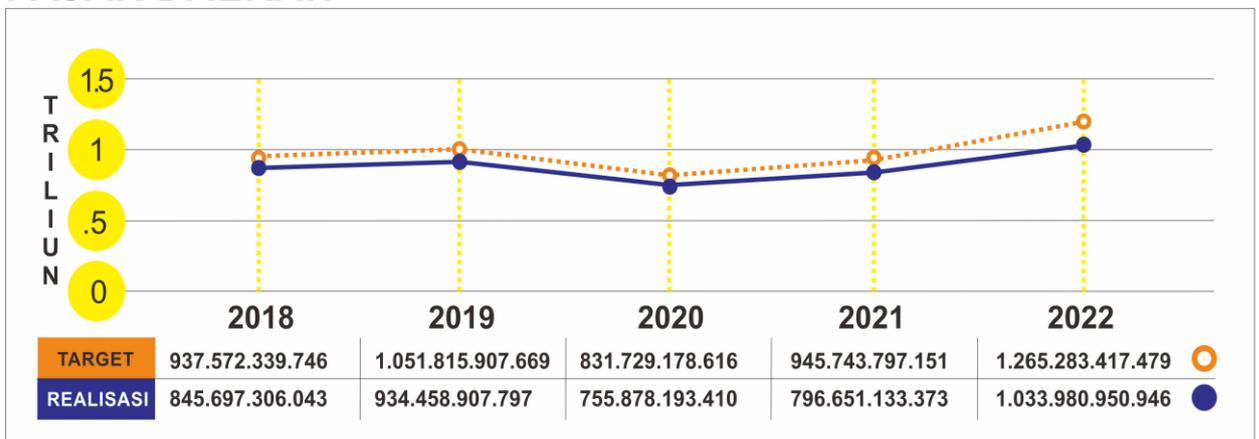
APBD



PAD



PAJAK DAERAH



3.2. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2022 Badan Pendapatan Daerah Kota Batam dalam melaksanakan kegiatannya mengacu pada Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra dan Renja, yang selanjutnya diimplementasikan melalui 2 Program, 6 Kegiatan dan 22 Sub kegiatan dengan Anggaran sebesar

Rp 36.405.723.346,00 yang bersumber dari APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2022.

Pada akhir Tahun Anggaran 2022, total Realisasi Belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam sebagaimana tertera pada tabel 3.6 dibawah ini

Tabel 3.6
Anggaran dan Realisasi Belanja masing-masing Program/Kegiatan
Tahun Anggaran 2022

No	Nama Kegiatan	Jumlah Menurut DPA-P SKPD (Rp)	REALISAI KEUANGAN	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	31.660.368.426	30.367.155.895	95,92
I.I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.602.539.447	22.768.442.891	96,47
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.534.699.447	22.700.602.891	96,46
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	67.840.000	67.840.000	100
I.II	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.821.479.219	1.657.860.285	91,02
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	11.128.950	9.453.000	84,94

No	Nama Kegiatan	Jumlah Menurut DPA-P SKPD (Rp)	REALISAI KEUANGAN	%
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.305.609.465	1.281.882.600	98,18
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	109.342.804	97.359.000	89,04
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000	28.800.000	96
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000	4.800.000	66,67
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	358.198.000	235.565.685	65,76
I.III	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	118.808.000	88.960.000	74,88
1.	Pengadaan Mebel	118.808.000	88.960.000	74,88
I.IV	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.220.101.760	5.043.760.069	96,62
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	439.155.000	410.380.053	93,45
2.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	174.000.000	151.200.000	86,90
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.606.946.760	4.482.180.016	97,29
I.V	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	897.440.000	808.132.650	90,05
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	474.930.000	414.420.700	87,26
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	336.710.000	308.751.950	91,70

No	Nama Kegiatan	Jumlah Menurut DPA-P SKPD (Rp)	REALISAI KEUANGAN	%
3.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	85.800.0000	84.960.000	99,02
II	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.745.354.920	4.131.702.600	87,07
II.I	5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	4.745.354.920	4.131.702.600	87,07
1.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1.488.760.000	1.310.702.600	88
2.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1.279.860.520	998.632.600	79,03
3.	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1.113.000.000	1.005.400.000	90,33
4.	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	278.800.000	257.200.000	92,25
5.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	125.422.400	110.280.000	87,93
6.	Penagihan Pajak Daerah	167.200.000	162.882.000	97,42
7.	Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah	292.312.000	287.272.000	98,28
TOTAL		36.405.723.346	34.498.858.495	94,76

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2022 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Batam tahun 2021–2026 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan pada tahun 2022. Dari pengukuran Indikator Kinerja Utama pada Persentase Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Target dengan realisasi sebesar 81,72%, Persentase Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Target dengan realisasi sebesar 82,26%.

Kekurangan dan keberhasilan yang telah dicapai selama tahun 2022 ini dijadikan sebagai *Feedback* (umpan balik) dalam meningkatkan kinerja, sekaligus sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan kedepan yang bersifat strategis.

Berbagai langkah yang harus ditempuh diantaranya:

- a. Dengan terus menggali potensi pajak yang belum terdata sehingga dapat mengoptimalkan pendapatan pajak;
- b. Meningkatkan koordinasi yang saling bersinergi di sektor pendapatan daerah dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota, instansi terkait dan pihak-pihak terkait.
- c. Peranan tindakan pendataan dan penagihan pajak secara profesionalisme lebih ditingkatkan lagi dengan cara memberikan pelatihan teknis terhadap SDM aparatur dalam mendata, menghitung potensi dan menjabarkan dalam bentuk database potensi yang akurat dan untuk selanjutnya dapat dijadikan pedoman dalam menentukan arah dan kebijakan dalam upaya meningkatkan target penerimaan daerah.
- d. Melakukan evaluasi secara rutin terhadap kegiatan yang sedang dilakukan, sehingga keberhasilan capaian indikator kinerja ditahun-

tahun berikutnya dapat ditingkatkan sebagai upaya merealisasikan terlaksananya tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Batam;

- e. Melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang pajak daerah dan retribusi daerah agar tercipta kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi dengan dilanjutkan upaya penegakan hukum (*law enforcement*) bekerjasama dengan instansi terkait;
- f. Melakukan revisi/penyempurnaan terhadap Peraturan-Peraturan terkait Pajak dan Retribusi Daerah agar dapat menyesuaikan dengan kondisi lapangan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2022 ini disusun, semoga dapat bermanfaat baik untuk eksternal sebagai bentuk pertanggungjawaban (baik kepada Pemerintah Pusat/ Provinsi/ Kabupaten maupun kepada masyarakat/publik) maupun untuk internal sebagai evaluasi, sehingga pelaksanaan baik program dan kegiatan maupun tugas dan fungsi seluruh elemen yang ada di Badan Pendapatan Daerah, khususnya dalam upaya mewujudkan target kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam.

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Nama Kegiatan	Tahun 2022						
		Rencana			Realisasi		Persentase	
		Anggaran (Rp)	Output	Target	Keuangan	Target	Keuangan	Fisik
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	31.660.368.426			30.367.155.895		95,92	100
I.I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.602.539.447			22.768.442.891		96,47	100
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.534.699.447	Jumlah ASN yang digaji dan diberi tunjangan	102 Orang	22.700.602.891	97 Orang	96,46	100
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	67.840.000	Jumlah Kegiatan yang ditatausahakan dalam 1 Tahun	22 Dokumen	67.840.000	22 Dokumen	100	100
I.II	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.821.479.219			1.657.860.285		91,02	100
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	11.128.950	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	9.453.000	1 Paket	84,94	100

No	Nama Kegiatan	Tahun 2022						
		Rencana			Realisasi		Persentase	
		Anggaran (Rp)	Output	Target	Keuangan	Target	Keuangan	Fisik
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.305.609.465	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	13 Paket	1.281.882.600	13 Paket	98,18	100
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	109.342.804	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 Paket	97.359.000	3 Paket	89,04	100
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	28.800.000	1 Paket	96	100
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.800.000	1 Dokumen	66,67	100
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	358.198.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Laporan	235.565.685	18 Laporan	65,76	100
I.III	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	118.808.000			88.960.000		74,88	100

No	Nama Kegiatan	Tahun 2022						
		Rencana			Realisasi		Persentase	
		Anggaran (Rp)	Output	Target	Keuangan	Target	Keuangan	Fisik
1.	Pengadaan Mebel	118.808.000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	88.960.000	6 Unit	74,88	100
I.IV	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.220.101.760			5.043.760.069		96,62	100
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	439.155.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	410.380.053	5 Laporan	93,45	100
2.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	174.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	151.200.000	2 Laporan	86,90	100
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.606.946.760	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.482.180.016	12 Laporan	97,29	100

No	Nama Kegiatan	Tahun 2022						
		Rencana			Realisasi		Persentase	
		Anggaran (Rp)	Output	Target	Keuangan	Target	Keuangan	Fisik
I. V	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	897.440.000			808.132.650		90,05	100
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	474.930.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	414.420.700	19 Unit	87,26	100
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	336.710.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	158 Unit	308.751.950	158 Unit	91,70	100
3.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	85.800.0000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	84.960.000	4 Unit	99,02	100
II	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.745.354.920			4.131.702.600		87,07	99,95

No	Nama Kegiatan	Tahun 2022						
		Rencana			Realisasi		Persentase	
		Anggaran (Rp)	Output	Target	Keuangan	Target	Keuangan	Fisik
II.I	5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	4.745.354.920			4.131.702.600	1,09 T	87,07	99,95
1.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1.488.760.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5 Laporan	1.310.702.600	5 Laporan	88	100
2.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1.279.860.520	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	998.632.600	12 Laporan	79,03	100
3.	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1.113.000.000	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak	24 Laporan	1.005.400.000	24 Laporan	90,33	100
4.	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	278.800.000	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	255 Layanan	257.200.000	295 Layanan	92,25	100

No	Nama Kegiatan	Tahun 2022						
		Rencana			Realisasi		Persentase	
		Anggaran (Rp)	Output	Target	Keuangan	Target	Keuangan	Fisik
5.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	125.422.400	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	11.500 Dokumen	110.280.000	11.500 Dokumen	87,93	100
6.	Penagihan Pajak Daerah	167.200.000	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	7.200 Dokumen	162.882.000	7.090 Dokumen	97,42	98,68
7.	Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah	292.312.000	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	700 Dokumen	287.272.000	700 Dokumen	98,28	100
TOTAL		36.405.723.346			364.498.858.495		94,76	99,99